

BAB I

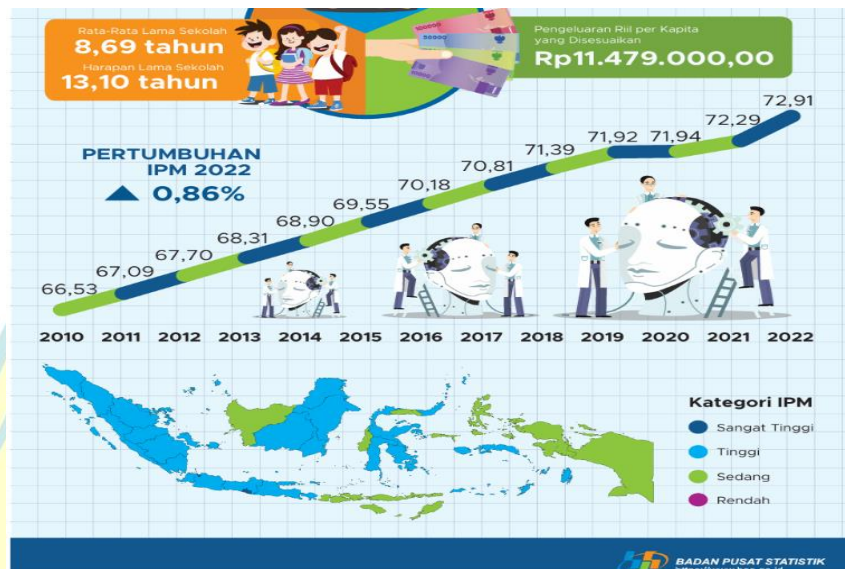
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia telah menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Seiring perubahan pandangan terhadap konsep pembangunan, semakin banyak negara menyadari bahwa kemajuan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tingkat pencapaian pembangunan manusia dievaluasi melalui pemanfaatan ukuran tertentu, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga dimensi utama yang menjadi dasar penyusunan indeks ini meliputi estimasi umur panjang sebagai gambaran kesehatan, tingkat partisipasi dan keberlanjutan pendidikan yang ditunjukkan melalui dua indikator lama sekolah, serta kondisi ekonomi individu yang tercermin dari pendapatan nasional bruto per orang (Senewe et al 2021). Sejalan dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi segenap rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai indikator yang bersifat multidimensi, IPM tidak hanya merepresentasikan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan capaian dan komitmen pemerintah dalam membangun kualitas manusia. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam mendorong kemajuan bangsa. (Anwar 2022)

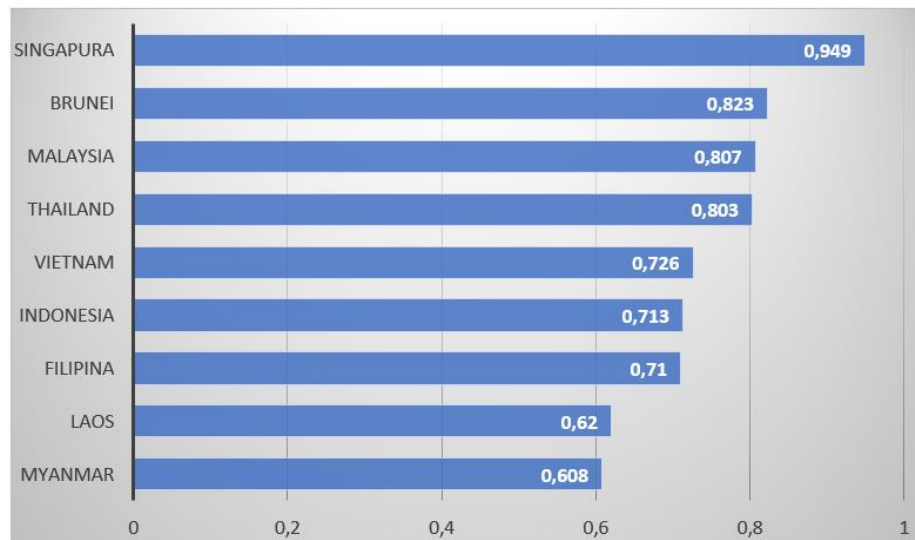
Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai IPM tercatat sebesar 72,29 dan mengalami kenaikan menjadi 72,91 pada tahun 2022. Laporan tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori Pembangunan manusia dengan status "tinggi." Peningkatan ini sejalan dengan perbaikan di berbagai sektor, seperti kualitas pendidikan, peningkatan angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat

yang juga terus membaik. Meskipun demikian, BPS mengidentifikasi adanya ketimpangan antarprovinsi. DKI Jakarta mencatatkan IPM tertinggi sebesar 81,65 pada tahun 2022, sementara Papua memiliki IPM terendah, yaitu 61,39 pada periode yang sama.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2022

Kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 negara-negara ASEAN dipantau dan dilaporkan secara independen oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). Dengan skor 0,713, Indonesia masuk dalam kelompok tinggi, tetapi masih berada di belakang rata-rata global 0,739. Selain itu, Indonesia menduduki peringkat ke-112 dari 193 negara. Jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal. (Anwar 2022)



Gambar 1.2 Skor IPM di Asia Tenggara Tahun 2022.

Sumber : UNDP, data diolah peneliti

Indonesia berada di peringkat keenam di kawasan ASEAN, di belakang Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Ketimpangan masih terlihat jelas jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, meskipun HDI Indonesia meningkat setiap tahun. HDI Thailand adalah 0,803, sedangkan HDI Indonesia adalah 0,713, menurut data UNDP. Ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia Indonesia masih kurang memadai. Tingginya tingkat pendaftaran perguruan tinggi di Thailand dan strategi yang lebih berhasil dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup warganya merupakan kontribusi utama terhadap pencapaian HDI negara tersebut. Thailand memiliki kebijakan lebih kuat dalam meningkatkan akses perguruan tinggi, termasuk beasiswa dan subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin. Di Indonesia kualitas pendidikan belum merata dan akses yang terbatas di daerah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam mengupayakan kenaikan tingkat keikutsertaan dalam perguruan tinggi.

Pendidikan adalah salah satu penyebab utama perbedaan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Partisipasi perguruan tinggi, yang merupakan persentase yang diperoleh dari rasio jumlah siswa yang terdaftar di perguruan tinggi tanpa memandang usia terhadap jumlah orang dalam kelompok

usia 19–23 tahun, partisipasi perguruan tinggi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kualitas pendidikan di suatu daerah. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi akan meningkat dengan tingginya tingkat partisipasi di perguruan tinggi, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan demikian, partisipasi dalam perguruan tinggi tidak hanya berkontribusi pada pengembangan individu tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mempercepat pembangunan manusia secara keseluruhan.



Gambar 1.3 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah peneliti)

Menurut laporan Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021 namun, pada tahun 2022 angka partisipasi perguruan tinggi mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perguruan tinggi di Indonesia belum mengalami peningkatan yang konsisten. Pandemi yang melanda sejak 2020 memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi terutama bagi keluarga miskin menghadapi kesulitan mengakses perguruan tinggi baik dari segi biaya pendidikan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat beasiswa dan bantuan

pendidikan dari pemerintah akses terhadap bantuan ini masih belum merata bagi seluruh calon mahasiswa, kurangnya infrastuktur yang memadai, maupun akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas. Oleh karna itu perlu diuji lebih lanjut bagaimana partisipasi perguruan tinggi berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Kemiskinan memiliki dampak signifikan terhadap Pembangunan Manusia. Menurut World Bank, kemiskinan mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, terutama terkait konsumsi dan pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sehingga menghambat pencapaian kualitas hidup yang layak. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan suatu negara. (Pradipta dan Dewi 2020).



Gambar 1.4 Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Dari Gambar 1.3 terlihat bahwa secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan secara keseluruhan dari Maret 2017 hingga September 2021. Namun, terjadi peningkatan pada Maret 2020 dan Maret 2021 akibat pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19.

Tabel 1.1 Persentase dan Jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2022

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	8,28	10,46	9,49	2,24	3,50	5,74
Jawa	7,63	11,90	9,01	7,93	5,92	13,85
Bali dan Nusa Tenggara	8,77	17,48	13,35	0,65	1,42	2,07
Kalimantan	4,52	7,08	5,82	0,37	0,61	0,98
Sulawesi	5,88	12,93	10,02	0,49	1,52	2,01
Maluku dan Papua	5,60	27,22	19,89	0,14	1,37	1,51
Indonesia	7,50	12,29	9,54	11,82	14,34	26,16

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut Tabel 1.1, Pulau Kalimantan memiliki persentase kemiskinan terendah (5,82%), sedangkan Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase tertinggi (19,89%). Dengan 13,85 juta, Pulau Jawa memiliki populasi orang miskin terbanyak, sementara Kalimantan memiliki jumlah terkecil, yaitu 0,98 juta.

Tingginya angka kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Dalam teori Modal Manusia Becker (1964), pendidikan adalah investasi yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu. Dalam konteks ini partisipasi perguruan tinggi yang diukur melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi, yang merupakan salah satu parameter penting untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam perguruan tinggi. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa partisipasi perguruan tinggi berkontribusi pada peningkatan kekayaan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, yang semuanya memiliki efek positif pada pembangunan manusia. Di sisi lain, kemiskinan membuat akses pendidikan menjadi lebih sulit, di mana kurangnya pendidikan memperburuk keadaan ekonomi dan menekan Pembangunan Manusia. Dengan demikian, meningkatkan akses pendidikan bagi populasi kurang beruntung menjadi taktik penting dalam mengakhiri siklus kemiskinan dan mendorong pengembangan individu yang memiliki kapasitas dan keterampilan unggul. Dalam hal ini, inisiatif untuk mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan Pembangunan Manusia suatu negara.

Berdasarkan temuan sebelumnya, Azizah et al (2024) menyatakan bahwa Angka Partisipasi Perguruan Tinggi berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia. Temuan tersebut menekankan peran perguruan tinggi dalam memajukan pembangunan manusia dengan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perguruan tinggi secara signifikan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Menurut penelitian oleh Hardhiansyah (2018) menyatakan bahwa Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian Dewi (2017) menyatakan hasil Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian Abie Rachman Muhamad dan Dewi Rahmi (2023) memperoleh hasil bahwa Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dengan adanya perbedaan temuan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Partisipasi Perguruan Tinggi dan Kemiskinan benar-benar berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia. Data dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan publik yang lebih efisien oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap untuk mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan sumber daya manusia yang terampil, efektif, dan berdaya saing global.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya dan untuk menentukan arah dan batasan penelitian maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Partisipasi Perguruan Tinggi terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia 2018-2022?
3. Apakah Partisipasi Perguruan Tinggi dan Kemiskinan memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Perguruan Tinggi terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Perguruan Tinggi dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Berperan aktif dalam memperluas wawasan teoritis terkait faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia.
 - 2) Memperkaya konsep dan pemahaman tentang pembangunan manusia, terutama terkait interaksi antara variabel seperti Partisipasi Perguruan Tinggi, Kemiskinan, dan Pembangunan Manusia.
 - 3) Menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang mendalami topik ini atau isu-isu terkait lainnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong peningkatan Pembangunan Manusia.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam perguruan tinggi serta dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Dengan penyebaran hasil penelitian yang lebih luas, diharapkan Masyarakat dapat memahami keterkaitan antara perguruan tinggi, kemiskinan, dan pembangunan manusia, sehingga dapat mendukung kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial.

